



Implementasi Kebijakan Pembangunan SDGs Desa Era Covid 19 di Kabupaten Simeulue Aceh

Nellis Mardhiah^{1*}, Zuhrizal Fadhly², Siti Jahriah Situmpol³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, West Aceh, Aceh 23681, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11/02/2022

Received in revised form 26/02/2023

Accepted 10/06/2023

Abstract

Research purposes to know *Implementation of public policies in the development of village SDGs in the aspect of achieving goal-II which prioritizes food security for the community in the COVID-19 era in a sustainable manner. This area is also an agricultural base where there are always conflicts over land grabs between farmer groups and planting plans according to local cultural demographics. Ironically, the government has provided a village development budget every year in the management of agricultural aspects, but this cannot be understood on a continuous basis by SKPK and village officials in achieving the objectives of the strategic plan. Qualitative research methods that focus on social solutions in real life, both individual practical problems or community groups and the impact can be felt directly by the community. Technical data collection through primary data and secondary data. Primary data, FGD. Interviews in this study are semi-structured (Semi-Structured Interview) and are carried out individually and in groups. The results of the study show that the implementation of village SDGs development policies in the aspect of achieving goals-II in the covid19 era is not optimal, there are still challenges in communication patterns that are not in the direction of the government and village governments, resources are not competent and the budget is still limited. However, the Goal-II village SDGs policy has an opportunity in community development that is normally understood and realized by the local government of the presence of customary institutions in accordance with Qanun Number 8 of 2010 in Aceh. This position will be strengthened by village government organizations in the future so that food security development can be achieved according to community expectations.*

Keywords: *Public Policy, Village SDGs, food security*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi kebijakan publik dalam pembangunan SDGs desa aspek capaian goal-II yang memprioritaskan ketahanan pangan bagi masyarakat di era covid19 secara berkelanjutan. Wilayah ini juga merupakan basis pertanian yang selalunya terjadinya konflik perebutan lahan antar kelompok petani dan rencana tanam sesuai dengan demografi budaya lokal. Ironisnya pemerintah telah menyediakan anggaran pembangunan desa setiap tahunnya dalam tata kelola aspek pertanian, namun hal tersebut tidak dapat dipahami secara kesinambungan SKPK dan aparat desa dalam mencapai tujuan rencana strategis. Metode penelitian kualitatif yang berfokus dalam pemecahan sosial

dalam kehidupan yang nyata baik masalah praktis individu atau kelompok masyarakat dan dampak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Teknis pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Data primer, FGD. Wawancara dalam penelitian bersifat semi terstruktur (Semi-Structured Interview) dan dilaksanakan secara individual dan group. Hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan pembangunan SDGs desa dalam aspek capaian goals-II di era covid19 tidak optimal, masih ada tantangan pola komunikasi yang tidak searah pemerintah dan pemerintah desa, sumberdaya belum kompeten dan anggaran masih terbatas. Namun akan tetapi kebijakan SDGs desa Goal-II mendapatkan peluang dalam pembangunan masyarakat secara normalitas dipahami dan disadari oleh pemerintah daerah kehadiran lembaga adat sesuai dengan Qanun Nomor 8 tahun 2010 di Aceh. Kedudukan ini akan diperkuat secara organisasi pemerintah desa pada masa yang akan datang demi pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai sesuai harapan masyarakat

Kata kunci: Kebijakan Publik, SDGs desa, Ketahanan Pangan

*Penulis Korespondensi

E-mail : nellismardhiah@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Penyebaran wabah Covid-19 semakin tak terbendung di setiap negara di dunia, termasuk bagi pemerintah Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya agar terhindar dari wabah yang sedang menyebar. Namun, adanya *disease containment* mengakibatkan terjadinya berbagai polemik dalam kehidupan masyarakat, negara, bahkan dunia. Kebijakan ini benar-benar melumpuhkan aktivitas masyarakat, menjadikan masyarakat harus menjaga jarak dengan orang lain di lingkungannya, membatasi, bahkan tidak diperkenankan untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini jelas mengakibatkan semakin melemahnya ekonomi rakyat. Banyak rakyat terancam hidupnya karena sudah tidak memiliki pekerjaan, sehingga kebutuhan pokok hidup nyaris tak terpenuhi.

Virus covid19 membuat tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan perbandingan informasi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019

sampai 2020. Menurut BPS pada September 2019, presentasi kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%, namun pada Maret 2020 meningkat sampai 9,78 %. Pengangguran di Indonesia juga melonjak drastis. Pada Agustus 2020 pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang atau mengalami kenaikan yang signifikan dari 5,23% menjadi 7,07 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik,2020).

Pembangunan SDGs merupakan pembangunan salah aspek kebijakan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan SDGs dapat dilaksanakan secara kesinambungan melalui undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara terintegrasi dalam mencapai pembangunan nasional (Sekar Panuluh & Fitri, 2015).

Indonesia sebagai negara yang telah menyukseskan ketentuan ketentuan kebijakan publik yang berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan pembangunan SDGs yang berpedoman kepada Pancasila (Pangestu et al., 2021). Hal ini seperti

persoalan baru yang dihadapi oleh pemerintah di wilayah Papua bukan hanya infrastruktur dan sumberdaya manusia saja, akan tetapi sistem pertahanan, pendidikan maju dan berkembang yang menjadi sorotan pemerintah sebagai sasaran pembangunan SDGs (Pribadi, 2017).

Menurut menegaskan kebijakan pembangunan SDGs desa merupakan salah satu tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui lembaga desa yang dinamis dan adaptif dalam sasaran pembangunan yang khas sesuai dengan potensi desa yang dimiliki demi percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan (A. Halim Iskandar, 2021). Maka oleh karena itu, memerlukan solusi yang nyata dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi dan sosial untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta isu kesetaraan gender di Indonesia (Baggio et al., 2018).

Begitu pula dinamika pembangunan SDGs desa dalam integrasi dan target dalam kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah dalam sasaran SDGs masih sangat lemah komitmen pemerintah daerah dan *stakeholders* dalam rencana aksi program pembangunan yang berkelanjutan (Sofianto, 2019). Demikian juga dalam (Patiung, 2019) menjelaskan permasalahan dan isu yang sangat strategis dapat dicapai diraih dengan sasaran pembangunan kebijakan SDGs.

Perwujudan ini juga memerlukan rencana aksi yang baik pemantauan dan evaluasi program dapat tersusun secara komprehensif untuk menyukseskan pembangunan suatu bangsa di mulai dari skala pembangunan *Bottom-up* versus *Top-down* yakni berasaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Daulay, 2020).

Provinsi Aceh salah satu wilayah local wisdom Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh yang memiliki kewenangan secara desentralisasi dalam pembangunan. Persentase penduduk di wilayah ini yang hidup di bawah garis kemiskinan 2018 sebesar 15,97% dan 2020 persentasenya menurun menjadi 14,99% terjadi peningkatan persentase kemiskinan di bulan Setember 2020 sebesar 0,44 poin dari periode sebelumnya. Pemerintah harus terus melakukan upaya yang lebih terarah dalam penghapusan kemiskinan agar tercapai pembangunan emas pada tahun 2030 sesuai sasaran SDGs (BPS, 2020).

Kabupaten Simeulue wilayah sangat strategis berbasis agro dan marine industri terletak di bagian barat Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam berlimpah lahan pertanian sawah padi, namun wilayah ini belum mampu secara komprehensif dalam mencapai tujuan pembangunan SDGs desa dalam aspek pembangunan pertanian yang berkualitas sesuai dengan ketentuan kebijakan. Wilayah ini juga merupakan basis pertanian yang selalu nya terjadinya konflik perebutan lahan antar kelompok petani dan rencana tanam sesuai dengan demografi budaya lokal. Ironisnya pemerintah telah menyediakan anggaran pembangunan desa setiap tahunnya dalam tata kelola aspek pertanian, namun hal tersebut tidak dapat dipahami secara kesinambungan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah dan aparatur desa dalam mencapai tujuan rencana strategis Kementerian Desa.

Tujuan khusus yang ingin dicapai penelitian untuk membentuk sistem

pengontrol pembangunan ekonomi masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang sehat dan bergizi secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pembangunan SDGs desa di era covid 19. Hal ini bersinergi dengan rencana strategis penelitian Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, kemandirian, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan pedesaan. Sasaran pembangunan yang memusatkan perhatian kepada tujuan *Goal-II* yakni; mengakhiri kelaparan mencapai kesejahteraan ekonomi, pola makanan yang bergizi dan mendukung pertanian yang berkelanjutan di desa di era covid 19.

Tujuan sasaran ini dapat menjadi fokus perhatian wilayah simeulue di Aceh sebagai salah satu wilayah pusat perhatian di Aceh yang memiliki potensi pertanian dan perikanan sesuai dengan basis capaian visi dan misi organisasi Universitas Teuku Umar dalam aktualisasi diri tri dharma perguruan tinggi.

Pembangunan SDGs merupakan target pembangunan dunia yang telah di ikrarkan dalam konferensi PBB dan organisasi UNCED di *conference Rio de Janeiro Brazil* pada tahun 1992. Konferensi kesepakatan dibahasakan lanjut di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002 (Omer & Noguchi, 2020).

Pembangunan SDGs secara universal di laksanakan oleh semua negara, akan tetapi hal ini menjadi momentum dalam mengeksplorasi jalan kedepan, serta tantangan dalam melanjutkan pembangunan dikerenakan pemahaman program rencana pembangunan tidak dipahami dengan baik dalam mencapai tujuan pembangun oleh sebuah negara (Sariguna et al., 2020).

Sasaran pembangunan pertanian yang berbasis SDGs ini untuk

menciptakan perubahan kebijakan pemerintah untuk menjaga dengan pendekatan *Remotely sensed Earth observations* (EO) untuk menjembatani kesadaran masyarakat akan nilai kebijakan (Whitcraft et al., 2019). Tujuan tersebut mendaari agar dapat mencapai keseimbangan lingkungan dan dampak pertumbuhan ekosistem pada tahun 2030 (Hinz et al., 2020).

Studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah (Whitcraft et al., 2019).

Studi kebijakan publik kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik (Thomas B. Smith, 1973)

Analisis dan implementasi kebijakan publik ini merupakan nilai dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik yang secara mendalam kepada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, maupun dampak direncanakan atau yang tidak diharapkan (Bertucci & Rosenbaum, 2007).

Implementasi kebijakan adalah proses kebijakan publik yang sama pentingnya dalam konteks mencapai tujuan kebijakan yang memiliki kerangka kerja (Mubarok et al., 2020).

Analisis implementasi kebijakan sebagaimana yang dinyatakan George Edward III, Marilee S Grindle, dan Teori Mazmanian dan Sabatier bahwa kerangka analisis kebijakan publik dalam mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan (Mubarok et al., 2020).

Model kebijakan publik memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan

dalam pelaksanaannya (Mubarok et al.,2020)

Implementasi kebijakan publik merupakan tugas dan kewajiban organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan yang berbasis kerangka kerja yang menghubungkan proses kepada 3 perkara. (1) hubungan kerjasama yang baik antar organisasi; (2), proses; (3) bentuk rencana kerja organisasi (George,2021).

Langkah tersebut diatas perlu diikuti sebagai strategi rencana pembangunan kebijakan pemerintah dengan melibatkan aktor yang dapat memberikan dukungan yang secara konstruktif dalam pengambilan keputusan (Barthwal & Sah, 2008).

Dimensi utama keberhasilan kebijakan publik yang dapat memberikan alternatif yang tepat dalam penambahbaikan prosedur penilaian keberhasilan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Barthwal & Sah, 2008)

Defenisi tentang implementasi kebijakan publik secara umum dapat dipahami adalah proses yang umum dalam tindakan administratif untuk dapat mencapai hubungan kerjasama yang baik dalam pengembangan tugas dan fungsi suatu organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Merilee S. Grindle, 2017).

Fokus penelitian untuk menyelesaikan pemecahan sosial dalam kehidupan yang nyata baik masalah praktis individu atau kelompok masyarakat dan dampak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam mencapai ketahanan pangan di era covid19. Maka capaian penelitian ini yang berorientasi kepada locus dan fokus agar tujuan dan sasaran yang direncanakan akan terpenuhi.

Ulasan yang sederhana tentang defenisi dan konsep implementasi kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua bahagian yaitu; (1)

implemetasi kebijakan merupakan persamaan fungsi dari maksud dan kedudukan kebijakan. Kedua; *output* dan *outcome* merupakan salah satu indikator sasaran dalam capaian organisasi; (2) fungsi ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pendekatan alternatif kebijakan secara kompreehnsif *top-down* dan *bottom-up* dengan ketentuan implementasi kebijakan yang diukur dari waktu tertentu (Sabatier, 1986).

Implementasi kebijakan publik perlu mengacu kepada pandangan para ahli terdahulu, hal tersebut dikarenakan setiap kebijakan publik dibuat harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam capaian organisasi. Disisi yang lain implementasi kebijakan memerlukan ulasan yang tepat sesuai dengan pespektif tujuan kebijakan yang tersedia (Haedar Akib, 2010).

Model Edward III Edward III (1984) dalam pelaksanaan kebijakan publik harus memiliki komunikasi suatu program dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pelaksana kebijakan publik konsisten dan memahami isian dan tujuan dari ketentuan pelaksanaan kebijakan publik (Goeorge C, 1984).

Begitupula aspek penyampaian informasi dalam ketentuan kebijakan publik memerlukan metode dan mekanisme yang tepat sasaran dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi (Edward III, 1984).

METODE PENELITIAN

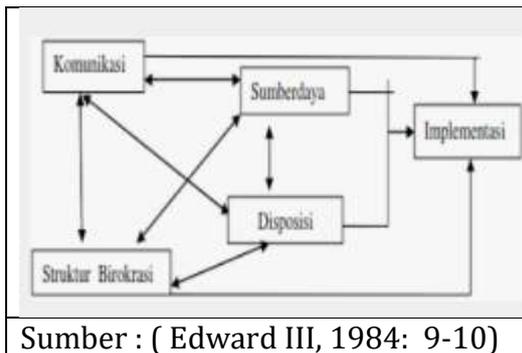
Metode penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan uraian permasalahan yang kompleks (Yusanto, 2020). Sampel dalam capaian penelitian ini dengan penetapan secara purposif sampling dengan tujuan dengan pertimbangan para pihak ditetapkan sebagai

informan atau narasumber sesuai dengan sasaran dan capaian penelitian (Khalefa & Selian, 2021).

Adapun yang menjadi informan dalam capaian penelitian ini adalah BAPPEDA, DPMD serta tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara secara mendalam sesuai dengan objek dan subjek penelitian yang telah ditetapkan (Busetto et al., 2020). Analisis data yang dilaksanakan secara interaktif beraskan pada indikator capaian dan tema ketentuan serta sub tema yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian objek permasalahan dalam ruang lingkup penelitian agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan rekomendasi (De Tommaso et al., 2021).

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Implementasi kebijakan publik dalam pelaksanaan pembangunan SDGs desa yang ditinjau model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Edward III (1984, 9-10) seperti dalam gambar 1.1 berikut:



Penjelasan gambar 1.1 diatas mengemukakan pendapat para ahli Edward III dalam dua pertanyaan pokok yaitu; (1) hal apasaja yang menjadi prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan berhasil dilaksanakan; (2) apasaja yang menjadi hambatan jika kebijakan

tidak dapat dilakauskan sesuai dengan ketentuan. Begitu pula dinamika dalam Implementasi kebijakan peningkatan pembangunan desa di era covid19 Kabupaten Simeulue adanya peluang dan tantangan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal demikian sebagaimana hasil wawancara dengan BAPPEDA menyatakan bahwa kebijakan pembangunan desa adanya tantangan dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan. Hal sama dengan pernyataan DPMD namun disisi yang lain dinamika pembangunan SDGs desa terdapat peluang ekonomi mandiri seperti bertani, nelayan mau tidak mau karena adanya keterbatasan interaksi sosial sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok. Keberhasilan dan capaian dalam proses dalam implementasi kebijakan pembangunan SDGs desa di era covid 19 sebagai berikut:

A. Komunikasi

Metode komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan SDGs harus disinerjikan dengan pola dan metode komunikasi yang partipatif antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Ato mau, 2015).

BAPPEDA menyampaikan bahwa pola komunikasi tujuan dan sasaran pembangunan SDGs desa dari pemerintah daerah kepada peringkat pemerintah desa dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan sudah dijalankan sesuai dengan rencana dalam aspek pembangunan pertanian sebagai indeks pembangunan dan ketahanan pangan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah di era covid 19. Akan tetapi dinamika ini tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah daerah jika disesuaikan dengan rencana aksi

pemerintah akibat dari pengaruh nilai sosial dan budaya masyarakat dalam pertanian.

Pemerintah daerah sebagai wilayah otonomi di Aceh adanya alternatif kebijakan yang tepat dapat disesuaikan oleh pemerintah yaitu penguatan dan optimalisasi Qanun adat Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga adat.

Begitupula titik dan koordinasi program pelaksanaan pembangunan SDGs desa dan ketercapaiannya di era covid 19 yang dikendalikan oleh DPMD Kabupaten Simeulue. DPMD menjelaskan bahwa koordinasi program sudah dikomunikasi sesuai dengan kebutuhan layanan program dari desa kepada pemerintah daerah. Namun pihak pemerintah hanya memberikan edukasi kepada pemerintah desa dalam tahapan rencana dan pelaksanaan pembangunan pertanian lahan padi di sawah di era covid 19.

Pengendalian dalam koordinasi ini tidak tersinkronisasi dengan baik kepada masyarakat di era Covid 19, justru para masyarakat mampu mawas diri dan bertani sesuai dengan potensi yang mereka miliki dengan keterbatasan informasi dan edukasi akibat *Social Distancing* di era covid 19. Maka dengan demikian pengendalian kebijakan tersebut sesuai dengan nilai aspek sosial dan budaya bagi kehidupan masyarakat yang mampu bertahan demi kebutuhan dan ketahanan hidup khususnya para petani padi.

Aspek pembangunan SDGs goal-II yaitu, bercocok tanam dengan konsisten sebagai mata pencaharian yang utama sebagai petani dan nelayan demi dapat bertahan hidup akibat *social distancing* di era Covid 19. Namun dengan begitu, keadaannya pemerintah daerah dan peringkat desa memerlukan pengontrolan yang lebih intensif agar pengendalian hasil

produktivitas lebih terjamin secara berkelanjutan.

Penyebaran informasi tentang tata kelola persawahan oleh pemerintah daerah di era covid 19 Kabupaten Simeulue masih sangat terbatas akibat dari jaringan akses internet yang sangat lemah, sehingga tidak dapat tersinkronisasi dengan efektif oleh pemerintah desa kepada kelompok tani. Maka untuk itu, harus lebih pro aktif dari pemerintah daerah khususnya DPMD dan Dinas Pertanian agar dapat berkolaborasi dengan baik dalam memberikan edukasi kepada kelompok tani sesuai dengan kebijakan undang-undang yang berlaku.

Pola komunikasi yang baik harus menerapkan standar waktu yang tepat sesuai dengan rencana kerja tahunan pemerintah yang secara konsisten dan terarah. Pola komunikasi sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan rencana kerja tahunan dalam tata kelola pangan dari rencana hasil gabah yang telah di prioritaskan.

B. Sumberdaya

Unsur-unsur organisasi pemerintahan sebagai peranan sumberdaya manusia dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya organisasi dalam menjalankan sebuah keputusan berdasarkan dalam teori pengambilan keputusan secara struktural dan fungsional (Rusydiyah & Rohman, 2020).

Teori struktural-fungsional memiliki empat fungsi yang sangat penting untuk semua sistem atau tindakan yang dikenal dengan skema AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (George Ritzer, 2015). Sistem AGIL menjelaskan bahwa ada empat (4) fungsi penting yang dibutuhkan untuk semua sistem sebagai berikut:

- a) Adaptasi (A): sistem harus mengatasi situasi eksternal yang kritis. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga lingkungan dapat beradaptasi dengan sistem;
- b) Pencapaian Tujuan (G): pencapaian tujuan sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama;
- c) Integrasi (I): Suatu sistem harus mengatur hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur hubungan antara tiga fungsi lainnya (A, G, L);
- d) *Latency* (L): pemeliharaan pola, suatu sistem harus dapat melengkapi, memelihara dan meningkatkan, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menimbulkan motivasi.

Sistem eksternal yang kritis yang harus dapat di sesuaikan oleh pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan publik (George Ritzer, 2015). Perwujudan ini salah satunya adalah dapat menciptakan ketahanan pangan kepada masyarakat di era covid19. Tujuan demikian harus dapat dikendalikan dengan baik di era covid19 agar sistematisa ketahanan pangan bagi kelompok tani secara khususnya dapat terlindungi dan terus berkembang secara berlanjut.

Pihak BAPPEDA di Kabupaten Simeulue sangat kesulitan dapat beradaptasi dengan ketentuan sistem terutama di era covid 19, dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang dana oprasional pemerintah yang dialihkan kepada kebutuhan dan katahanan ekonomi masyarakat. Maka oleh karena itu, pihak pemerintah adanya keterbatasan dalam menyelaraskan kebutuhan dalam pembangunan di era covid 19.

Pencapaian tujuan dinamika hal diatas merupakan tanggungjawab nilai sosial kemasyarakatan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyesuaikan diri dengan alternatif kebijakan yang lain agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian dalam kebutuhan tersebut dapat dianalisis dan dikaji secara mendalan sesuai dengan normalitas nilai budaya masyarakat dapat dioptimalkan dengan baik. Tujuan nilai dan normalitas budaya ini diperkuat oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang harus dijaga dan dipelihara serta dihargai supaya keadaan lingkungan mempunyai kepekaan oranisasi peduli dengan keberadaan sistem dan aturan yang telah ditetapkan.

Hubungan sistem dan fungsi organisasi pemerintah yang secara integrasi dalam tata kelola produktivitas persawahan padi di era covid 19 di Kabupaten simeuleu sudah berjalan dengan baik. Hal demikian berdasarkan hasil wawancara dengan DPMD menjelaskan bahwa pemerintah desa disetiap wilayah di simeulue sering melakukan koordinasi program dan aktualisasi kegiatan dan capaian kegiatan pembangunan desa selama covid 19.

Meskipun dalam pandangan pemerintah desa masih adanya keterbatasan dana dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Maka untuk itu, pemerintah desa di Kabupaten Simeulue sudah ada upaya dan langkah strategi dalam perwujudan kebijakan pembangunan desa yang berbasis SDGs, namun penyesuaian hasil pengendalian ekonomi masyarakat dengan bercocok tanam melalui musyawarah dan mufakat dengan kelompok tani dan pemerintah serta lembaga adat.

Keberadaan lembaga adat dalam tata kelola persawahan di Simeulue di

libatkan secara aktif oleh pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dan rencana penanaman selama era covid19. Akan tetapi hasil konsolidasi pemerintah tidak mengarahkan alternatif kebijakan lembaga adat ini, meskipun sudah terbukti dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat selama covid 19 di Kabupaten Simeulue.

Pemeliharaan sistem hubungan yang baik dalam kelompok masyarakat harus dibina dalam organisasi (George Ritzer, 2015). Pemerintah desa di wilayah Simeulue sudah berjalan dengan optimal di era covid19. Menurut hasil wawancara tokoh masyarakat hubungan terjaga dan terpelihara dengan baik dikarenakan nilai keakraban kelompok tani dan lembaga adat.

Maka dengan demikian mekanisme pemeliharaan hubungan yang lebih efektif dan efisien dapat dijalankan oleh pemerintah di Kabupaten Simeuleu melalui ketentuan kebijakan dan kearifan lokal di aceh yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga adat. Ketentuan lembaga adat dapat dioptimalkan dengan baik dengan memahami tugas dan fungsi serta keberadaan memerlukan mekanisme dan pola yang tepat dijalankan pemerintah desa agar terwujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan.

Selain sumberdaya manusia juga aspek pelaksanaan kebijakan publik adalah sumberdaya anggaran sebagai landasan awal dalam perencanaan pembangunan untuk mengoperasionalkan kegiatan sesuai dengan sasaran kebijakan publik (George Ritzer, 2015).

Sumber daya anggaran yang proporsional sangat menentukan dalam upaya pengelolaan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan

publik. Mekanisme anggaran bukan hanya sekedar kebutuhan teknis akan tetapi juga merupakan kebutuhan politik dalam mencapai strategi dalam organisasi (Tangko, 2021).

Maka dengan demikian perencanaan kegiatan pembangunan desa di era Covid19 tidak dapat dikendalikan baik, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana. Hal demikian disebabkan oleh adanya kebutuhan dana alokasi khusus untuk kebutuhan langsung tunai sebagai bantuan sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kontinue sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Perencanaan dana alokasi sektor pemberdayaan ekonomi pemerintah di evaluasi dengan baik agar mendapatkan keadilan dan tata cara pendistribusian dengan tepat sasaran bagi masyarakat. Perkembangan perencanaan dana pembangunan di era covid19 dijadikan catatan penting oleh pemerintah daerah untuk menjadi cerminan dalam pengembangan pembangunan masa yang akan datang.

Perencanaan dana desa yang tepat sasaran sesuai dengan tinjauan aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dapat mendukung tentang keberadaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Abidin, 2015).

C. Disposisi

Sikap birokrasi dalam implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan pendekatan keprilakuan (*Behavioral Uproaches*) yang merupakan sikap kesadaran yang secara realitas dalam suatu penolakan terhadap kebijakan baru dikarenakan adanya perasaan khawatir terhadap perubahan itu sendiri (Subianto, 2020). Penerapan analisis organisasi pemerintah dengan pendekatan keprilakuan adanya

langkah dan strategi yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan kebijakan dalam suatu organisasi. Adapun bentuk daripada pendekatan strategi yang dimaksud adalah penerapan analisis keprilakuan pada masalah-masalah manajemen dalam pengembangan organisasi atau dikenal dengan "OD" yaitu *Organizational Development*. "OD" yang dimaksud adalah suatu proses untuk menimbulkan suatu perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan perilaku dalam pengorganisasian kegiatan.

Disamping itu "OD" juga berperan dalam pengembangan organisasi dengan konsultasi kepada para ahli dalam pemecahan masalah publik yang dihadapi organisasi, menyempurnakan cara perumusan (Subianto, 2020).

Selain itu, menurut DPMD Kabupaten Simeulue menyampaikan bahwa pemecahan masalah dalam melaksanakan kebijakan SDGs desa di era covid19 dalam aspek capaian goals-II bahwa pembangunan ketahanan pangan hanya memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi saja. Maka untuk itu, hal yang dihadapi oleh organisasi pemerintah desa diberikan motivasi dan arahan dalam menjalankan kebijakan pemerintah tentang aktualisasi pengembangan sektor pembangunan ekonomi seperti yang dinyatakan oleh (Subianto, 2020).

Tujuan dan harapan kepada pemerintah desa pastikan juknis yang tepat dalam data penduduk dalam distribusi bantuan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan secara adil dan merata dan sesuai dengan pembangunan SDGs. Pengendalian masalah publik di level ini bagi pemerintah daerah di era covid19 memberikan arahan kepada pemerintah desa dan tenaga ahli desa

dapat melaksanakan kebijakan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan rencana aksi di lapangan.

Rencana aksi dilapangan menimbulkan konflik dengan masyarakat akibat kurang pemahaman tentang tujuan dan isian kebijakan dalam penanggulangi program pemberdayaan ekonomi (Wahyu Purhantara, 2009). Maka dengan demikian diharapkan kepada pemerintah daerah dapat memperkuat organisasi kemasyarakatan yakni peranan lembaga adat dalam tata kelola pertanian sebagai salah satu nilai perubahan dalam suatu organisasi dapat menyelesaikan konflik yang cenderung membawa arah organisasi atas pengaruh lingkungan eksternal maupun secara internal.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan tata dan mekanisme proses kerja yang memiliki standar dan oprasional dan prosedur yang telah ditetapkan dalam organisasi (Edward III, 1984). Standar oprasional dan prosedur (SOP) dalam menjalankan implementasi kebijakan pembangunan SDGs di era covid19 secara kesibambungan untuk mencapai ketahanan pangan produktif di Kabupaten Simeulue.

Pihak pemerintah daerah yang terlibat dalam pengambilan keputusan seperti, BAPPEDA, DPMD, pendamping desa di Kabupaten Simeulue pengendalian perencanaan pembanguna desa tidak memiliki SOP yang konkret. Mekanisme tata kerja organisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa melalui koordinasi dan rapat serta penyampaian informasi melalui surat resmi demi ketercapaian tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik dalam pengembangan organisasi sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintahan tidak memiliki SOP sehingga tidak dapat mencapai tujuan kebijakan yang konsekuensi. Maka untuk itu, diharapkan kepada senegap pemerintah dalam pencapaian tujuan kebijakan publik harus ada pengendalian unsur dan tata kelola organisasi yang tepat agar tugas dan fungsi dapat dicapai secara efektif dan efisien (Siregar et al., 2021).

Peluang Kebijakan pembangunan SDGs desa di era covid19 memiliki dapat dikategorikan memiliki peluang bagi pengembangan diri secara ekonomi dan pendapatan di sektor pertanian padi di wilayah Simeulue. Hal demikian sebagaimana hasil wawancara dengan BAPPEDA Simeulue yang menyatakan bahwa era covid19 masyarakat kembali sektor pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian yang utama. Sehingga pihak pemerintah berinisiatif membuka lahan baru agar bercocok tanam sehingga produktivitas padi dapat lebih di tingkatkan.

Hal demikian pendapat diatas merupakan salah satu peluang bagi masyarakat dapat mencapai ketahanan pangan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Program ketahanan pangan ini yang diharapkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Model ketahanan pangan yang berbasis SDGs adalah salah satu pendekatan dengan membentuk lahan produktif, peningkatan produktivitas di pasar secara tradisional agar dapat meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan (Siregar et al., 2021).

Selanjutnya selama era covid19 terobosan yang baru dalam pengembangan organisasi

pembangunan desa. Salah satunya adalah kedudukan dan kehadiran lembaga adat bersama masyarakat yang menjadi nilai yang kuat sebagai alternatif petunjuk bercocok tanam sesuai dengan musiman demografi secara tradisional.

Pendekatan ini melahirkan suatu gambaran baru bagi pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan bagi pemerintah bahwa lembaga adat dapat membantu pemerintah sesuai dengan amanah Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat di Aceh.

Tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan SDGs di era covid 19 secara umumnya adalah Pola komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat di era covid19. sebagaimana dalam menjelaskan bahwa pola komunikasi yang dibina diatas prinsip-prinsip interaksi dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan kebijakan pemerintah (Putra & Handoko, 2021).

Namun dengan demikian pola komunikasi tersebut tidak dapat harmonis di era covid19 dikeranakan akses dan transformasi informasi tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah di era covid19.

Demikian halnya yang terjadi di pemerintah Simeulue dalam implementasi kebijakan SDGs desa aspek ketahanan pangan. Hal tersebut pihak BAPPEDA dan DPMD berkoordinasi dengan tenaga ahli desa dapat membentuk pola koordinasi yang searah sesuai dengan ketentuan kebijakan publik. Meskipun pola ini adanya keterbatasan yang dilaksanakan akibat ada pola baru kebijakan sosial pembatasan sosial berskala besar.

Berikut tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Simelue dalam hal komunikasi dengan pemerintah desa untuk mewujudkan

kebijakan pembangunan SDGs desa goal-II ketahanan pangan di era covid 19. Secara umum ada dua faktor penyebab hambatan dalam hal komunikasi tersebut, yaitu:

- a) Pemberlakuan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau jaga jarak antar warga (*social distancing*) di Kabupaten Simeulue yang mengakibatkan terbatasnya interaksi dan komunikasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa;
- b) Adanya miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa khususnya lembaga adat terkait perencanaan dan pelaksanaan aktivitas bercocok tanam di daerah Simeulue.

Penataan sumber daya manusia hal yang paling penting dalam pengembangan organisasi dalam pembangunan organisasi di era revolusi 4.0 (Hidayat et al., 2020). Pernyataan ini sangat berkaitan dalam tujuan organisasi pemerintahan demi keberlangsungan pembangunan kebijakan SDGs.

Keberadaan sumber daya manusia yang dianggap kompeten di tingkat pemerintah desa di wilayah Simeulue belum dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi dengan baik sebagai pendamping desa dikarenakan bidang pendidikan dan pengetahuan yang dibina oleh kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan bidang keahlian dalam tata kelola organisasi pemerintahan (Hidayat et al., 2020).

Hal ini dinyatakan oleh pihak BAPPEDA kabupaten Simeuleu bahwa pemerintah pusat harus dapat mengevaluasi kinerja dan kedudukan koordinasi fungsi pendamping desa yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan pemerintah. Selain itu, juga tantangan pemerintah desa dalam perwujudan pembangunan SDGs desa

dalam capaian Goals-II yakni sumber anggaran yang menjadi dilema dan tantangan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pihak pemerintah desa di Simeulue dapat mengoptimalkan pola produktif pangan secara tradisional secara normalitas sosial pemerintahan dalam kedudukan lembaga adat local wisdom aspek petanian dan perikanan di era covid19 sebagaimana di tegaskan dalam qanun Nomor 8 tahun 2010 tentang lembaga adat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan SDGs desa dalam aspek capaian goals-II di era covid19 tidak dapat dioptimalkan dengan baik. Hal demikian disebabkan adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti, BAPPEDA, DPMD, pendamping desa serta segenap wilayah pemerintah desa di Kabupaten Simeuleu.

Tatangan yang dihadapi adalah pola komunikasi tidak searah dengan kebijakan pembangunan SDGs dan mekanisme pengontrolan tidak maksimal, akibat adanya alternatif kebijakan baru PSBB di era Covid19 yang menjadi kekhawatiran dalam pengendalian pembangunan dan pengembangan organisasi pemerintahan yang berkelanjutan. Keberadaan pendamping desa di era Covid19 belum dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi dengan baik dalam pengendalian organisasi secara khusus titik koordinasi tidak secara spesifik dengan pengendalian SOP pelayanan publik.

Peluang yang baik dalam pengembangan diri masyarakat petani dan nelayan di era covid19 adalah nilai normalitas yang secara tradisional masyarakat bersama lembaga adat mewujudkan pembangunan SDGs desa aspek Goals-

II petani dan nelayan dengan semangat local wisdom Aceh sesuai dengan langkah dan strategi baru pemerintah mewujudkan pelaksanaan kebijakan lembaga adat sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang lembaga adat di Aceh.

Maka demikian diharapkan gagasan ini dapat ditinjau tentang pendamping desa sesuai dengan tugas dan fungsinya yang secara kesinambungan dalam perwujudan pembangunan SDGs desa. Serta pengembangan organisasi di peringkat desa dan mengakui keberadaan lembaga adat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kepada para yang mendukung penelitian ini antara lain: (1) Universitas Teuku Umar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, Tahun Anggaran 2022 Nomor: 140/UN59.7/SPK-PPK/2022. (2) Pihak pemerintah daerah kabupaten Simeulue BAPPEDA, DPMD dan yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta basis data dan informasi sehingga penulis dapat mengajikan data sesuai dengan objek gagasan penelitian yang telah dicapai.

REFERENSI

- A. Halim Iskandar. (2021). SDG'S DESA PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN. *Wacana Kinerja*, 24, 137-139.
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- ato mau, jose. (2015). Peran Komunikasi Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bersumber Anggaran Pembiayaan Negara. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 339-341.
- Baggio, R. A., Saraswati, R. R., Teknik, F., Jakarta, U. N., & Jakarta, U. N. (2018). *Islam Menjawab Tantangan SDGS di Indonesia : A Literatur Review*. 3(2), 47-55.
- Barthwal, C., & Sah, B. (2008). ROLE OF GOVERNMENTAL AGENCIES IN POLICY IMPLEMENTATION. *The Indian Journal of Political Science*, 69(3), 457-472. <http://www.jstor.org/stable/41856437>
- Bertucci, G., & Rosenbaum, A. (2007). *Implementing the Millennium Development Goals: Challenges and Responses for Public Administration*.
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Daulay, M. T. (2020). Model Pengendalian Kemiskinan Dengan Pendekatan Diversifikasi Usaha, Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Economic Value (Studi Pada Daerah Pemekaran Di Sumatera Utara). *Quantitative Economics Journal*, 6(3), 203-221. <https://doi.org/10.24114/qej.v6i3.17546>
- De Tommaso, S. F. N., Rodrigues, I., & Pinsky, V. C. (2021). Análise Interativa Qualitativa: uma contribuição metodológica para pesquisas em sustentabilidade. *Administração: Ensino e Pesquisa*, 22(2), 271-293.

- <https://doi.org/10.13058/raep.2021.v22n2.2019>
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Impelementing* (edited 198). Jai Perss Inc.
- George, B. (2021). Successful Strategic Plan Implementation in Public Organizations: Connecting People, Process, and Plan (3Ps). *Public Administration Review*, 81(4), 793–798. <https://doi.org/10.1111/puar.13187>
- George Ritzer. (2015). *Moderen Sociological Theory* (J. 13220 (ed.); Sevent Eds). PRANADA MEDIA GROUP.
- Goeorge C, E. I. (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc.
- HAEDAR AKIB. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Hidayat, N., Hubeis, M., Sukmawati, A., & Eriyatno, E. (2020). Model Pengelolaan Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi Era Industri 4.0. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(3), 501–513. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.3.501>
- Hinz, R., Sulser, T. B., Huefner, R., Mason-D’Croz, D., Dunston, S., Nautiyal, S., Ringler, C., Schuengel, J., Tikhile, P., Wimmer, F., & Schaldach, R. (2020). Agricultural Development and Land Use Change in India: A Scenario Analysis of Trade-Offs Between UN Sustainable Development Goals (SDGs). *Earth’s Future*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.1029/2019E001287>
- Khalefa, E. Y., & Selian, S. N. (2021). *Non-Random Sample Strategy in Qualitative Art-Related Studies*. 8(June), 35–49.
- MERILEE S. GRINDLE. (2017). *Politick and Policy Implemetation in the Third World* (MERILEE S. GRINDLE (ed.)). University Press.
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). *Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle*. 5(1), 33–38.
- Omer, M. A. B., & Noguchi, T. (2020). A conceptual framework for understanding the contribution of building materials in the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). *Sustainable Cities and Society*, 52(May 2019), 101869. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869>
- Pangestu, F. P., Rahmadianti, N. S., & Hardiyanti, N. T. (2021). *Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030*. 1(3), 210–219.
- Patiung, M. (2019). ANALISIS PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDGs KABUPATEN MOJOKERTO. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.30742/jisa.v19i1.686>
- Pribadi, R. E. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Papua. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 917–932. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
- Putra, A., & Handoko, T. (2021). Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah

- Penyebaran COVID-19. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.40>
- Rusdiyah, E. F., & Rohman, F. (2020). Local Culture-Based Education: An Analysis of Talcott Parsons' Philosophy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*, 12(3), 1–16. www.ijicc.net
- Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>
- Sariguna, P., Kennedy, J., & Ekonomi, F. (2020). Modul ekonomi pembangunan. In *Modul ekonomi pembangunan*.
- Sekar Panuluh, & Fitri, M. R. (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2(September), 1–25.
- Siregar, K. H., Manday, C. C. R., & Efendi, B. (2021). MODEL CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS): INSTRUMEN KETAHANAN PANGAN INDONESIA SDGs. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 601–609.
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25–41. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.*
- Tangko, S. A. (2021). Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 52–57. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a882%0Ahttp://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/download/a882/637>
- Thomas B. Smith. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209. <http://www.jstor.org/stable/4531525>
- Wahyu Purhantara. (2009). Organizational Development Based Change Management. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(2), 154–166.
- Whitcraft, A. K., Becker-Reshef, I., Justice, C. O., Gifford, L., Kavvada, A., & Jarvis, I. (2019). No pixel left behind: Toward integrating Earth Observations for agriculture into the United Nations Sustainable Development Goals framework. *Remote Sensing of Environment*, 235(May), 111470. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111470>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>